

ANALISIS PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KECAMATAN PULAU RAKYAT KABUPATEN ASAHAN

Riska Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

riskanasution81@gmail.com

Marliyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

marliyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dalam melakukan analisis dan mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan terkhususnya Kecamatan Pulau Rakyat terhadap upaya penanggulangan tingkat kemiskinan serta beberapa faktor yang mampu memberikan pengaruh dalam menanggulangi taraf kemiskinan dan pengangguran. Dalam mencapai tujuan tersebut, peneliti menerapkan teknik penelitian kualitatif menggunakan langkah menguraikan data yang sudah diperoleh dengan deskriptif. Adapun teknik mengumpulkan data dilaksanakan dengan wawancara dan dokumentasi menerapkan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian menampilkan bahwa adanya percobaan yang dilaksanakan pemerintahan daerah dalam menanggulangi tingkatan kemiskinan dan pengangguran yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Asahan dari berbagai program seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya. Dalam proses penyelenggaraan strategi menanggulangi taraf kemiskinan dan pengangguran, ada beberapa jenis faktor yang berpengaruh mencakup faktor pendukung dan penghambat. Serta pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan pendekatan Internal dan Eksternal.

Kata Kunci Program Pemerintah, Kemiskinan dan Pengangguran.

I. PENDAHULUAN

Dengan stabil, pemerintah menyusun berbagai kebijakan untuk menangani langkah percepatan proses tumbuh dan kembang perekonomian dan meminimalkan tingkatan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan sebuah situasi adanya kegagalan dalam menangani permasalahan dasar berupa pangan, pakaian, tempat tinggal, tempat pendidikan, dan ketentraman. Kemiskinan dan penganggurana dalah sebuah permasalahan pokok banyak negara dan salah satunya Indonesia sebagai negara yang terbagi atas banyak pulau yang menyebar dari Sabang hingga Merauke sehingga menjadikan negara tersebut memiliki banyak penduduk tertinggi dan mengakibatkan tinggi pula permintaan pada keperluan hidup harian. Akan tetapi, keperluan itu sendiri tidak terpenuhi bagi keluarga miskin.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan sebuah permasalahan besar di setiap bangsa sampai di daerah, dikarenakan dua hal tersebut mempunyai pengaruh nyata bagi penduduk dan bangsa tersebut. Dalam hal menanggulangi tingkatan kemiskinan juga pengangguran, yang dijadikan sebagai fokus tujuan adalah cara wujud penanggulangan

dalam menambah tingkat penghasilan secara rata dan jalan yang mudah dalam mendapatkan pendidikan, air, dan kesehatan, serta lain-lain. Indonesia sudah mencatatkan total masyarakat miskin dari Badan Pusat Statistika, menunjukkan dari tahun 2016 – 2019 dengan terus menerus menampilkan tren penurunan total masyarakat miskin. Ini adalah suatu perolehan yang baik. Tetapi di tahun 2020, total masyarakat miskin mengalami peningkatan mencapai 0,97% yaitu 27,56 juta. Hal tersebut karena jumlah yang naik disebabkan dari penyebaran virus covid-19 yang berpengaruh terhadap transmisi sikap dan kegiatan perekonomian penduduk hingga memberi pengaruh jumlah kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Pulau Rakyat merupakan satu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara dan masih memiliki beberapa masalah kemiskinan. Meskipun sebagai kecamatan yang memiliki peningkatan cukup baik, total kemiskinan di Pulau Rakyat termasuk kategori yang tinggi. Mengacu pada jumlah kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Angka kemiskinan Kabupaten Asahan mengalami peningkatan dari 9,04 persen pada Maret 2020 menjadi 9,35% pada Maret 2021. Selama Maret 2020 – Maret 2021 garis kemiskinan (GK) naik sebesar 7,35%, yaitu dari Rp351.314,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp377.752,- per kapita per bulan pada Maret 2021. Penyebab kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran salah satunya dikarenakan penyebaran covid 19 memberikan pengaruh pada kegiatan kenaikan perekonomian, penghasilan, serta keperluan harian.

Pulau Rakyat juga merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Asahan yang terkenal dengan objek wisatanya, dimana kenaikan perekonomian telah sebagai masalah penting untuk penanggulangan tingkatan kemiskinan dan pengangguran. Maka dengan adanya program pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya, diharapkan mampu menurunkan dua poin masalah di atas di Kabupaten Asahan terkhususnya di Kecamatan Pulau Rakyat.

Dari data di atas, menunjukkan bahwasanya tingkatan kemiskinan dan pengangguran di Pulau Rakyat menghasilkan kenaikan dan penurunan lalu tahun sebelumnya telah menunjukkan peningkatan tingkatan kemiskinan juga pengangguran. Maka dari itu, pemerintahan butuh sebuah peraturan atau keputusan guna percepatan tumbuh dan kembang perekonomian telah konsisten, selain itu meningkatkan mutu sumber daya manusia dan juga alam yang berlimpah di semua daerah Indonesia, begitu juga masyarakat muslim yang dihimbau bekerja dan berbelanja terkhususnya bagi keperluan primer.

II. LANDASAN TEORI

1. Program Pemerintah

Peran pemerintahan untuk aktivitas hidup masyarakat sudah menyebar dengan nyata sepanjang sejarah manusia. Pemerintahan berperan sentral untuk mewujudkan keamanan mendasar sampai memperhatikan urusan agama, keyakinan, dan mengelola perekonomian bangsa dan secara terkini memberi jaminan keamanan aktivitas hidup sosial.

Pemerintah juga memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Upaya yang tepat untuk menangani kedua hal tersebut dilakukan pemerintahan terbagi atas dua komponen, yaitu perlindungan keluarga dan golongan masyarakat yang miskin serta pengangguran sementara, dan berikutnya berperan bagi masyarakat yang memiliki kemiskinan kronis melalui pemberdayaan dan pencegahan adanya kemiskinan terbaru, begitu juga dengan kasus pengangguran. Upaya itu sendiri

berikutnya tertuang pada 3 program yang ditujukan bagi pendudukan miskin, antara lain:

- 1) Menyediakan keperluan pokok;
- 2) Mengembangkan sistem jaminan sosial; serta
- 3) Mengembangkan budaya usaha dan masyarakat miskin memiliki upaya tersendiri dalam mengatasi masalah miskin.

Pada dasarnya pemerintahan dalam sebuah negara memiliki tiga fungsi pokok yaitu fungsi pengalokasian yang mencakup berbagai sumber perekonomian berbentuk jasa dan barang layanan penduduk; fungsi pendistribusian yang mencakup penghasilan atau pendapatan, pembangunan yang merata; fungsi stabilitas yang mencakup keamanan, pertahanan, moneter, dan perekonomian. Secara umum kegunaan stabilitas dan pendistribusian fungsi tersebut secara tepat dilakukan pemerintahan pusat, sementara kegunaan pengalokasian secara umum dapat tepat dilakukan pemerintahan daerah, sebab biasanya daerah lebih mengenal keperluan dan kriteria layanan masyarakat.

Berikut program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta pengangguran:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), satu dari serangkaian aktivitas dalam meminimalkan penyebaran covid 19 pada ekonomi.

2. Kemiskinan

Menurut (Alawiyah, 2021) Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara berkembang di mana kemiskinan adalah masalah yang signifikan. Kemiskinan telah menjadi isu penting bagi Indonesia sejak berdirinya dan belum pernah dipelajari secara mendalam. Karena kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan analisis yang terintegrasi untuk mengidentifikasi mekanisme penanggulangan yang terbaik dan bertahan lama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penghasilan rendah untuk menutupi kebutuhan dasar adalah bagaimana kemiskinan biasanya didefinisikan. Di Indonesia, metode kebutuhan dasar digunakan untuk mengukur kemiskinan. Tiga indikator kemiskinan digunakan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar: indeks hitungan kepala, indeks kedalaman kemiskinan (juga dikenal sebagai indeks gp kemiskinan), dan indeks keparahan kemiskinan (Ramdhan, Setyadi, & Wijaya, 2017).

Kemiskinan juga diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004), menjelaskan sebagai situasi sosial perekonomian setiap orang ataupun kelompok yang tidak memiliki akses terhadap berbagai hak dasar dalam mendukung serta membangun aktivitas hidup yang berguna.

Jika dilihat dari sudut ekonomi, kemiskinan diakibatkan oleh ketimpangan kepemilikan sumber daya, yang menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata, variasi kualitas sumber daya manusia, variasi akses terhadap modal, dan prospek lapangan kerja yang minimal. Tingginya tingkat kemiskinan merupakan tanda bahwa masyarakat belum berpartisipasi dalam pembangunan secara berarti (Indika & Marliza, 2019).

Kemiskinan adalah masalah umum yang sudah ada mulai dari manusia itu ada. Selain itu selalu muncul dan secara terus menerus sebagai masalah dari waktu ke waktu.

Kemiskinan merupakan sebuah persoalan yang kompleks karena pengaruh dari beberapa indikator yang berhubungan satu sama lain, berupa tingkatan penghasilan, pengetahuan, jalan jasa atau barang, tempat, geografis, jenis kelamin, serta situasi lingkungannya (Puspa & Inggit, 2016).

Terdapat berbagai penyebab kemiskinan yaitu (Putri, 2020):

- a) Kemiskinan *structural* didefinisikan sebagai kemiskinan yang dibawa oleh superstruktur yang memungkinkan beberapa individu atau organisasi untuk mengontrol ekonomi, masyarakat, politik, dan budaya. Masyarakat terpinggirkan dalam proses pembangunan oleh sistem ini, yang juga tidak memiliki pemerataan dan gagal menumbuhkan keunggulan dan orisinalitas individu.
- b) Kemiskinan *cultural* diartikan sebagai kemiskinan yang dibawa oleh budaya dan disebut kentjaringanrat dalam antropologi, dengan mentalitas atau budaya kemiskinan sebagai hadirnya budaya yang miskin, sehingga bisnis semakin lama semakin tidak menguntungkan, semakin banyak program yang terlibat. dalam mengurangi kemiskinan, tetapi ada juga banyak orang miskin.

3. Pengangguran

Menurut (Novriansyah, 2018) masalah pengangguran tentu terbilang kompleks jika dikaji serta sebagai persoalan yang sentral, dikarenakan mampu dihubungkan pada berbagai indikator seperti ekonomi yang memberikan pengaruh tingkatan pengangguran berupa kenaikan perekonomian bangsa terkait, tingkatan inflasi, total gaji dan kemiskinan yang diberlakukan. Jika sebuah bangsa mengalami tumbuh dan kembang ekonomi secara signifikan, diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap total pengangguran yang menurun.

Berdasarkan (Indayani & Hartono, 2020) Pengangguran merupakan setiap orang yang telah dikategorikan untuk angkatan kerjanya, dan dengan aktif mencoba menemukan profesi di sebuah tingkatan gaji tertentu, namun tidak mampu mendapatkan profesi yang diharapkan. Sedangkan menurut (Putong, 2017) Pengangguran ataupun yang tidak memiliki pekerjaan merupakan seseorang yang tidak memiliki profesi dan kegiatan mencoba mendapatkan pekerjaan. Pada umumnya pengangguran tidak mempunyai tugas di umur kerja dan masa kerjanya.

Berdasarkan (Prawira, 2018) Besar jumlahnya angka orang yang menganggur mampu sebagai pengukuran kesuksesan perekonomian yang sedang dibangun. Hal tersebut karena pengangguran adalah satu dari berbagai tolak ukur dalam menampilkan tingkatan ketentraman disebabkan pembangunan perekonomian. Masalah ini juga tentu sangat sentral dikaji sebab berhubungan pada berbagai variabel ekonomi lain, seperti gaji minimal provinsi, tumbuh dan kembang perekonomian, serta tingkatan pendidikan.

Pengangguran adalah suatu permasalahan, tidak hanya dikarenakan pengangguran akan memboroskan dana, namun juga memberi pengaruh sosial yang buruk contohnya peningkatan perbuatan kriminal dan penyimpangan moral. Namun pada aspek lainnya pengangguran secara umum dilaksanakan secara suka rela yang disebabkan karena menetapkan pekerjaan, menunggu, menyesuaikan, berhenti dan mencoba menemukan tempat kerja baru sebab tidak sesuai, tidak cocok, atau masalah di perusahaan, serta beberapa alasan lain.

Pada kenyataannya, pengangguran terbagi atas 3 jenis, antara lain:

- a) Pengangguran Siklis, merupakan pengangguran yang terjadi ketika permintaan lebih rendah dari yang seharusnya. Banyak pekerja berkeinginan untuk bekerja pada tingkat upah yang berlaku, tetapi tidak ada lowongan karena alasan tersebut

di atas, oleh karena itu pengangguran semacam ini disebut sebagai pengangguran paksa.

- b) Pengangguran Friksional, merupakan seseorang yang menganggur saat mencari pekerjaan dikatakan dalam pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini disebut sebagai pengangguran sukarela karena mereka yang baru siap memasuki dunia kerja telah meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan guna belajar dan mengembangkan keterampilannya, sedangkan mereka yang telah bekerja telah meninggalkan pekerjaannya untuk bekerja. cari yang baru. Ada juga yang menganggur karena sudah memiliki cukup uang (deposito) untuk menunjang gaya hidupnya
- c) Pengangguran Struktural, merupakan pengangguran yang diakibatkan dari ketidaksesuaian antara struktur angkatan kerja dan struktur permintaan tenaga kerja, sebagaimana ditentukan oleh faktor-faktor seperti pendidikan dan tingkat keterampilan, jenis kelamin, pekerjaan, industri, geografi, dan informasi. Penyebab pengangguran struktural ini bisa alami dan karena kebijakan (pemerintah). Misalnya, mungkin ada kebijakan untuk mengisi posisi di bidang-bidang tertentu yang tidak semua orang mampu melakukannya meskipun mereka benar-benar memenuhi persyaratan, peraturan pengupahan, atau proyek-proyek padat modal.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dan jangka waktu penelitian dari bulan Juni s/d Agustus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, agar dapat diketahui pengaruh program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta dengan pendekatan yang dilakukan agar dapat terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengentasan. Sumber data dalam penelitian ini adalah yang diperoleh langsung dengan lengkap dan akurat melalui survei lapangan. Penelitian ini juga menggunakan jenis data primer yaitu melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan. Metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu melaksanakan tahapan wawancara menggunakan langkah komunikasi langsung dengan lisan dan dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui penelusuran beberapa variasi pustaka dalam mendapatkan informasi, data keputusan pemerintahan dalam menanggulangi taraf kemiskinan dan pengangguran. Populasi dalam penelitian ini adalah data UMKM, Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu pemerintah, UMKM, Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran di Kecamatan Pulau Rakyat tersebut. Untuk data pelaku UMKM dalam penelitian didapatkan melalui wawancara ke seluruh desa yang ada di Kecamatan Pulau Rakyat. Sedangkan untuk melihat tingkat pengangguran dan kemiskinan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

IV. HASIL PENELITIAN

Pengentasan kemiskinan adalah satu dari berbagai fokus utama membangun dengan konsisten dilakukan pemerintahan terhadap rencana kegiatan bantuan sosial untuk orang-orang yang miskin. Berdasarkan (Citra & Imsar, 2022), kemiskinan merupakan individu ataupun sekelompok orang yang tidak mampu untuk mencukupi seluruh keperluan dasar keluarganya. Hal tersebut disebabkan persentase dan jumlah keseluruhan penduduk miskin di Pulau Rakyat masih meningkat, meskipun porsi penduduk cukup besar. Penduduk hidup sedikit di atas garis kemiskinan, dimana angka

kemiskinan Kabupaten Asahan meningkat dari 9,04 persen pada Maret 2020 menjadi 9,35% pada Maret 2021, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan (GK) naik 7,35% antara Maret 2020 dan Maret 2021, naik dari Rp 351.314 per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp 377.752 per kapita per bulan pada Maret 2021. Indeks keparahan kemiskinan P1 dan P2 menunjukkan peningkatan kemiskinan. P1 naik dari 1,37 pada 2020 menjadi 1,90 pada 2021 sementara P2 meningkat dari 0,33 menjadi 0,59 pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran orang miskin pada umumnya cenderung meningkat di atas garis kemiskinan dan kesenjangan antara orang kaya dan miskin dalam hal pengeluaran semakin melebar.

Kekhawatiran tentang kemiskinan semakin membesar sebab tinggi pula angka pengangguran baik itu secara terbuka dan juga tertutup. Pengangguran merupakan masalah yang menjadi masalah umum di berbagai daerah sama halnya yang terjadi di Pulau Rakyat. Hal ini dikarenakan masih minimnya lapangan pekerjaan, informasi, dan pendidikan. Dikutip dari data BPS, Jumlah Pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Asahan Berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 10.538 sedangkan perempuan sebanyak 6.582. Tingkat pengangguran adalah situasi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun mencoba menemukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dan apabila terjadi peningkatan pengangguran dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah telah berupaya keras selama beberapa waktu untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Pulau Rakyat, meskipun faktanya masalah ini tersebar luas di seluruh dunia. Jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Pulau Rakyat sendiri sebenarnya bisa berkurang jika masyarakat setempat juga ikut serta dalam semua inisiatif pemerintah, baik secara finansial maupun agama dari perspektif Islam, dan mematuhi kebijakan pemerintah. Ini akan membantu masyarakat lokal dan pemerintah daerah membuat kemajuan melawan kemiskinan dan pengangguran.

Pada kenyataannya, orang-orang yang berada dalam kondisi buruk yaitu, yang memiliki sumber daya yang rendah, produktivitas yang buruk, pendapatan yang buruk, tabungan yang buruk, dan investasi yang buruk adalah yang menghasilkan kemiskinan. Mirip dengan pengangguran, tingkat pengangguran mengacu pada situasi seseorang saat mereka tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Diantisipasi bahwa investasi produktif akan mendorong perluasan ekonomi, menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rata-rata, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah telah berjanji untuk melaksanakan sejumlah program untuk mendistribusikan uang kompensasi bensin, termasuk yang akan mendukung pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bukan hal baru untuk membuat program dengan tujuan membina UMKM. Banyak program yang telah dihasilkan, namun belum memberikan dampak yang besar. Untuk mendukung keberhasilan inisiatif ini, kita perlu melihat lagi apa yang harus dilakukan. Hal ini sebenarnya merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan kredit mikro bagi perusahaan kecil dan mikro. Sumber pendanaan lain untuk kredit mikro adalah bagian dari dana kompensasi bahan bakar. Optimisme keberhasilan inisiatif ini cukup tinggi karena diperkirakan perluasan UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Pulau Rakyat akan berdampak signifikan terhadap upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

UMKM memainkan peran yang terhormat dan memiliki beberapa potensi untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi. Lebih dari 85% angkatan kerja bekerja

di sektor UMKM, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kesejahteraan karyawan yang bekerja di sektor UMKM tentunya akan dapat ditingkatkan dengan upaya memajukan industri. Lebih banyak tenaga kerja saat ini yang dapat diserap oleh UMKM, yang akan membantu mengurangi pengangguran.

Untuk memerangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Pulau Rakyat, sejumlah program pemerintah juga telah dilakukan, antara lain bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat kurang mampu, dan mendukung usaha mikro dan kecil. Dibahas juga inisiatif pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui program bantuan sosial.

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk memerangi kemiskinan di Pulau Rakyat adalah Program Keluarga Harapan (PKH), program pendukung klaster satu. Keberadaan program keluarga harapan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam menghadapi tuntutan yang semakin berat. Dalam program PKH ini, pemerintah tidak hanya membantu kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin untuk menegakkan hak-hak tersebut.

Program bantuan pemerintah sangat membantu perekonomian masyarakat miskin, sehingga mendapat respon dari masyarakat terkait dengan program untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Mereka menerima bantuan untuk membayar kebutuhan makan, biaya pendidikan anak, dan biaya pengobatan. Perlu di garis bawahi bahwa dukungan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengangkat masyarakat dari kemiskinan; upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya harus diimbangi dengan hal tersebut.

Sehubungan dengan dukungan tersebut, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta kondisi ekonomi (KPM), tingkat pendidikan anak prasejahtera, serta kesejahteraan dan gizi ibu hamil atau nifas. perempuan dan anak-anak di bawah usia enam tahun.

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu wujud usaha pemerintahan untuk mampu memberi bantuan guna meminimalkan beban penduduk miskin mengenai biaya pokok yang harus dikeluarkan. Pemerintah mengantisipasi bahwa skema ini akan memberi kegunaan yang besar untuk penduduk miskin, sehingga menurunkan pengeluaran mereka. Pelaksanaan bantuan pemerintah meliputi penyaluran bantuan beras kepada yang berhak.

Dukungan BPNT tidak dapat diambil secara tunai; sebaliknya, itu harus ditukar dengan bahan pokok seperti beras atau telur tergantung pada kebutuhan orang miskin yang menerimanya. Agar dapat digunakan kembali sebelum jadwal penyaluran bulan berikutnya, bantuan ini juga dapat disimpan sebagian di rekening penerima. Salah satu media pemberdayaan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dikembangkan secara tegas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam mengatasi permasalahan, mewujudkan potensinya, dan memenuhi kebutuhannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dua pilar utama yang menopang operasional KUBE saat ini adalah komponen ekonomi dan sosialnya.

Jika seseorang atau kelompok ingin menerima bantuan melalui program KUBE, mereka harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Asahan. Kriteria dan persyaratan ini antara lain memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengembangkan bisnis, memiliki akses

terbatas ke sumber daya seperti modal, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar program pendampingan KUBE yang difokuskan tepat sasaran dan berfungsi efektif. Setelah itu diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Asahan bagi masyarakat yang akan segera mendapatkan bantuan melalui program ini. Tujuan program KUBE selanjutnya yang diharapkan dapat tercapai antara lain peningkatan pendapatan, kelangsungan ekonomi masyarakat, dan kemampuan usaha yang dimiliki untuk berkembang dengan baik.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tidak diragukan lagi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan bahkan nasional. Untuk menjadi pilar dalam kerangka perekonomian suatu daerah, dunia usaha juga telah berhasil membuka lapangan kerja dengan tetap memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha produktif milik orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah usaha mikro. Usaha kecil adalah perusahaan menguntungkan yang beroperasi secara mandiri, dijalankan oleh individu atau badan, dan tidak termasuk dalam definisi perusahaan menengah atau besar seperti yang didefinisikan oleh undang-undang ini. Itu juga tidak termasuk dalam definisi anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang lebih besar. Usaha ekonomi produktif yang disebut dengan “usaha menengah” adalah usaha yang dijalankan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha lain yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, baik dengan usaha kecil maupun usaha besar yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini (Lathief & Sundari, 2021) (Muhammad Lathief Ilhamy Nst, 2018).

UMKM sebagai salah satu jenis usaha masyarakat yang dimulai atas prakarsa seseorang. Kebanyakan orang percaya bahwa UMKM hanya membantu kelompok orang tertentu. Padahal, UMKM membantu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. UMKM tidak hanya memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang belum termanfaatkan di suatu daerah, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang menganggur dalam jumlah besar (Husniyah, Basyah, & Mustofa, 2022).

Permasalahan UMKM secara umum yang ditemukan di lokasi penelitian adalah permasalahan yang sama dengan yang pernah diungkapkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya permasalahan modal kerja yang mempunyai batasan serta manajerial tim yang tidak selesai, yang menyebabkan usaha berkembang menghadapi berbagai hambatan berupa tata kelola modal kerja, produksi barang tidak teratur, keahlian dan kemampuan pegawai yang masih kurang, dan permasalahan pemasaran produk (Agustina, Yafiz, & Irham, 2021). Mirip dengan masalah khas daerah, tantangan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Pulau Rakyat meliputi kekurangan uang, informasi bisnis, teknologi, spesialis, tantangan pengadaan, pemasaran, dan distribusi barang, serta masalah peraturan dan kebijakan pemerintah. Namun, banyak UMKM yang ragu untuk datang ke bank, terutama mengingat banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan kredit dari Bank.

UMKM mampu menunjukkan ciri dan kriteria seperti jumlah usaha dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, orientasi, dan pengelolaan SDM (Nirwan, Semmaila, & Aminuddin, 2021). Oleh karena itu, UMKM juga dapat menjadi strategi untuk menurunkan angka pengangguran saat ini dengan melakukan pelatihan dan

sosialisasi kepada UMKM, sehingga masyarakat dapat membuka lapangan kerja sendiri sesuai dengan preferensi dan keterampilan tertentu.

Terkait program pemerintah KUBE, pemerintah juga menetapkan beberapa syarat dan persyaratan, seperti: memiliki usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan; dan pemohon tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan yang dituangkan dalam keputusan politik dikenal dengan istilah implementasi kebijakan pemerintah daerah. Karena pemerintah belum mendapatkan data update dari kementerian pusat, kebijakan yang telah diterapkan Pemkab Asahan melalui program-program yang ada diklaim masih belum efektif dan *off-course*. Mengingat persoalan keterbatasan jaringan di desa juga menjadi sumber hambatan dalam proses penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin, karena masih ada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan namun belum atau belum mendapatkan program bantuan, dan distribusi bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin juga tidak merata.

Untuk memerangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Pulau Rakyat, sejumlah program pemerintah telah dilakukan, antara lain bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat kurang mampu, dan mendukung usaha mikro dan kecil. Namun, ada beberapa elemen yang membantu atau menghambat pelaksanaan inisiatif pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui program-program bantuan yang ada.

a) Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat berkomitmen untuk mensukseskan program bantuan PKH guna membantu Kabupaten Asahan khususnya Kabupaten Pulau Rakyat menurunkan derajat kemiskinan dan pengangguran masyarakat. Kedua, masyarakat sebagai penerima program bantuan PKH memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dalam melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan dan menyekolahkan anaknya agar dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketiga, pelaksana program jaringan bantuan PKH bekerja sama dengan cukup baik. Aparat daerah adalah pelaksana yang dimaksud di bidang kesehatan, sedangkan guru atau wali kelas adalah pelaksana yang dimaksud di bidang pendidikan.

Sementara masalah-masalah berikut mencegah program bantuan PKH untuk sepenuhnya dilaksanakan: Pertama, ada sedikit pertimbangan bagi orang miskin ketika datang ke hukuman yang dijatuhkan ketika mereka ditemukan melanggar kesepakatan atau komitmen yang dibuat dalam hal makanan, kesehatan, dan pendidikan. Tidak adanya dukungan keuangan, seperti dana, adalah masalah kedua. Prosedur pendanaan merupakan faktor penting dalam menentukan hasil pelaksanaan program bantuan PKH. Oleh karena itu diperlukan dukungan anggaran yang substansial.

b) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan program BPNT sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran pada masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Program ini juga memiliki faktor pendukung lain dalam implementasi kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Berikutnya kemampuan program BPNT untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Peserta program bantuan BPNT memiliki komitmen untuk melakukan proses pendataan penerima manfaat secara tertib.

Sulitnya peserta penerima BPNT menarik uang bantuannya karena kondisi jalan yang buruk, serta lokasi yang jauh dari akses internet dan pusat layanan perbankan. Implementasi kebijakan pemerintah Pulau Rakyat dari program BPNT sebenarnya masih belum mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran karena masih ada masyarakat miskin yang tidak memiliki akses pekerjaan.

Dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran pemerintah juga melakukan pengembangan secara Internal dan Eksternal untuk pelaku UMKM di Kecamatan Pulau Rakyat guna membantu masyarakat dalam bidang UMKM yaitu sebagai berikut:

a. Pengembangan Secara Internal

- Pengadaan permodalan

Modal merupakan faktor paling penting untuk membukakan dan mengembangkan suatu bisnis, dikarenakan UMKM adalah suatu bisnis yang memanfaatkan permodalan tersendiri sehingga modal membutuhkan peran pemerintahan. UMKM yang dikelola juga kadang dijebak pada suatu ikatan dari rentenir sebab akses yang masih rendah pada beberapa sumber pembiayaan formal. Dengan adanya peran KUBI dan pemberdayaan UMUM diharapkan dapat sebagai tempat pembuka dan pengembangan bisnis masyarakat yang mendapat bantuan guna mampu mengatasi taraf kemiskinan dan pengangguran. Dari adanya program tersebut maka dapat terlaksananya usaha penanggulangan kemiskinan dan pengangguran seperti Islam mengajarkan untuk tidak hanya memberi bantuan berdasarkan aspek konsumsi saja namun juga berdasarkan aspek pendapatannya.

- Inovasi hasil produksi

Inovasi menurut (Sriwardani, Fajar, & Maria, 2022) diyakini mampu menambah tingkat hasil kerja usaha, dan juga mampu tercapai pada saat seseorang ataupun kelompok tertentu mendapatkan suatu ide, memberitahukan gagasan, dan mengimplementasikan suatu hal terbaru. Produk yang bermutu tinggi dapat menambah tingkat harga pasar hingga berdaya saing pada produk lainnya melalui luar Pulau Rakyat. Diharapkan produk yang mempunyai mutu tinggi dikomersialkan dengan memanfaatkan peran digital sampai ke tahapan pemasaran yang praktis dan mudah. Sehingga mengenai hal tersebut pemasaran produk ke pasar domestik tetapi juga di pasar internasional sesuai pada peningkatan kuantitas produk.

- Perluasan jaringan pemasaran

Satu dari berbagai langkah melakukan pengenalan peluang UMKM di Kecamatan yaitu melaksanakan pemasaran dari digital. Peluang para UMKM di Kecamatan Pulau Rakyat merupakan jalur lintas menuju objek wisata yang cukup terkenal seperti air terjun Siponot, air terjun Sigura-gura memiliki peluang yang besar untuk menarik para wisatawan. Terdapat berbagai langkah dalam melaksanakan pemasaran digital, seperti memanfaatkan media sosial berupa youtube, facebook, dan lainnya yang memanfaatkan jasa periklanan. Dengan adanya kehadiran revolusi digitalisasi, pengelola usaha kecil menengah dapat menggunakan pertumbuhan teknologi secara mudah dan murah. Beberapa aplikasi yang disediakan dengan gratis juga dapat digunakan sehingga tidak membebani para pemilik usaha tersebut.

b. Pengembangan Secara Eksternal

UMKM adalah sebuah bisnis yang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi bangsa Indonesia, maka dalam pelaksanaan UMKM tersebut butuh optimalisasi dan penggalan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan pembangunan perekonomian penduduk. Hal tersebut tentunya dapat mengalami perkembangan secara baik dari suatu dorongan pemerintahan untuk memberi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan

dalam menunjang tata laksana serta pengembangn bisnis yang dilakukan guna mampu memperoleh mutu produk secara efektif sehingga mampu memiliki daya saing pada pasar nasional.

Seperti strategi dilaksanakan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Asahan yang mencakup aktivitas sosialisasi dan pembimbingan dengan turun ke lapangan ataupun dari aktivitas mengajak UMKM yang terdapat di daerah Pulau Rakyat. Tahapan pembimbingan berpusat terhadap proses belajar mengajar berkelanjutan, berubah, dan tumbuh dengan mendapatkan hasil untuk pembangunan yang terpenuhi kebutuhan sumber daya seseorang. Pembimbingan mengarah langsung ataupun tidak terhadap harapan pekerja dalam menambah tingkat semangat, memperoleh target, dan mengoptimalkan peluang. Artinya kegiatan pembimbingan adalah pemberdayaan seseorang terhadap fasilitas belajar individu, pertumbuhan individu, serta memperbaiki hasil kerja. Pelaksanaan aktivitas lainnya dilaksanakan adalah dari fasilitas UMKM berbentuk permodalan, hal tersebut yaitu bantuan pemerintahan dan kerja sama dengan suatu bank, dan lembaga lainnya. Bantuan juga berupa alat fasilitas untuk pengembangan bisnis UMKM.

Kembali kepada fenomena kemiskinan dan pengangguran, kemiskinan dan pengangguran adalah masalah yang sangat kompleks. Islam menganjurkan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang dengan meningkatkan fitrah kehidupan mereka dan mempromosikan pengembangan perdamaian masyarakat melalui zakat, infak, dan shadaqah. Islam, secara struktural, memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menciptakan dan memelihara pendapatan dan kekayaan rakyat secara adil dan setara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sangat penting dalam hal ini. Negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1. Definisi Islam tentang mengatasi kemiskinan dan pengangguran menyatakan bahwa meskipun masalah ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, namun dapat dikurangi secara signifikan.

Berkaitan dengan program bantuan yang telah dilaksanakan pemerintah di Kecamatan Pulau Rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, masyarakat miskin tetap dituntut untuk berusaha memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun mendapat bantuan. Hal ini dimaksudkan agar bantuan yang diberikan dapat mengurangi kebutuhan pangan, kesejahteraan, sekolah, dan bantuan sosial pemerintah daripada berusaha menutupi kebutuhan setiap orang yang hidup dalam kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya untuk mengakhiri kemiskinan dan pengangguran dalam Islam berhasil karena komitmen pribadi.

Mengenai kewajiban masyarakat, tentu Islam telah memerintahkan setiap golongan untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini; hanya mereka yang menerima bantuan pemerintah yang gagal menegakkan kewajiban-kewajiban ini, yang mencegah Islam membuat kemajuan apapun dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran. Agar inisiatif untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran berhasil, peserta program bantuan pemerintah daerah harus menjunjung tinggi komitmennya.

KESIMPULAN

Program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin benar-benar menunjukkan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Asahan dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, khususnya di Kecamatan Pulau Rakyat. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama

(KUBE) dan bantuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan program bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat miskin yang dikategorikan sebagai bantuan sosial (UMKM). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan program bantuan pemerintah daerah untuk sasaran utamanya, masyarakat miskin, menunjukkan bahwa ada hal-hal yang menyebabkan kerusakan kurang maksimal, yang tentunya dipengaruhi oleh keadaan. Namun dilihat dari pelaksanaan program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang dapat disalurkan sesuai dengan kriteria yang ada dan pelaksanaannya, secara keseluruhan pelaksanaan program bantuan tersebut sudah cukup baik.

Ketika program bantuan pemerintah daerah diberlakukan untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Asahan, khususnya di Distrik Pulau Rakyat, ada aspek yang mendorong dan mengecilkan hati yang mempengaruhi pelaksanaannya. Komitmen pemerintah, koordinasi partai yang efektif, dan pengembangan motivasi individu untuk dapat melaksanakan kegiatan program bantuan adalah semua aspek pendukung. Selain itu, masalah lain yang menghambat program bantuan antara lain ketidaktahuan masyarakat miskin akan konsekuensi dari pelanggaran tanggung jawab mereka, hubungan yang tidak menyenangkan antara orang-orang, kurangnya keterampilan para pelaku program dukungan UMKM, dan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Kehadiran UMKM yang paling terlihat menunjukkan peranan merupakan kemampuan untuk menyerap sumber daya dalam meminimalkan pengangguran. Untuk banyak pihak yang memiliki kreatifitas, inovasi, dan mempunyai motivasi kerja tinggi, akan dapat sebagai daya tarik dalam mewujudkan suatu UMKM. Hal tersebut karena pelaku usaha memiliki kebebasan dan kesadaran setiap bisnis yang besar diawali dari usaha terkecil yang memiliki potensi menjadi besar. Dan fleksibilitas serta kemampuan secara efektif dan dinamis untuk penyesuaian diri pada situasi pasar yang secara mudah mengalami perubahan pesat dibandingkan usaha besar yang biasanya lebih lambat. Berikutnya, pada saat para pelaku usaha sudah mempunyai bisnis yang mandiri, maka permasalahan kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi lebih mudah, karena permasalahan tersebut secara umum muncul sebab para pelaku usaha tidak mempunyai pekerjaan dan artinya tidak memiliki pendapatan. Seseorang yang tidak berpendapatan, termasuk dalam kemiskinan, dimana hal tersebut adalah kenyataan hidup.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keputusan pemerintahan seperti pemberdayaan UMKM dari peran modal usaha tidak keliru dan sentiasa diharuskan terus meningkat, karena UMKM juga terkadang disebut sebagai “usaha masih kurang modal”. Namun, harus disadari kehadiran UMKM tersebut bermacam-macam dan tidak selalu menjadi permasalahan pokok serta pertama yang diperlukan dari UMKM yaitu persoalan modal. Dapat menjadi permasalahan pokok yang dialami UMKM yaitu permasalahan yang terbatas karena faktor pemasaran seperti batasan terhadap sektor pasar dan persaingan yang masih rendah sehingga persoalan tersebut diharuskan dapat sesegera mungkin dituntaskan. Maka dari itu, diharapkan program kebijakan yang baik diimplementasikan untuk memberdayakan UMKM dengan sifat simultan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya.

2. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing yang memberikan arahan sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, MH selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak selaku Sekretaris Prodi Rahmad Daim Harahap, M. Ak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Kedua orang tua, Ayah dan Mama yang telah memberikan cinta dan didikan luar biasa, serta membantu dalam jerih payahnya, doa, harapan, serta semangat yang mampu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Teruntuk Mama Erlina, yang tak pernah lupa *video call* setiap harinya serta tak lupa juga kepada Ayah Rahmad Hidayat Nasution, yang tak pernah mengeluh dalam memberi materil maupun moril untuk kebutuhan selama menempuh pendidikan yang membuat saya menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kepada Uak Endra Gunawan, S.E., M.S.I yang telah membantu dan membimbing sejak awal saya memasuki jenjang Strata I.
8. Adik saya Febya Nasution dan Rahima Husna yang sedang menempuh pendidikan di kampus yang sama dan Athifa Lulu Nasution.
9. Keluarga besar dari Nenek Rodiah Panjaitan dan Kakek Syahlan Nasution yang sudah terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini, serta keluarga besar dari Kakek Ramli dan Nenek Analila.
10. Keluarga besar KOHATI dan HMI Komisariat FEBI UIN-SU sebagai wadah extra penulis dalam berproses.
11. Sahabat seperjuangan saya, Nadia Evira, Sonya Lionisya, Rizka Nasution dan Aini Zahara sebagai saksi keriwahan saya dalam menutup pendidikan Strata I ini. Selanjutnya terimakasih saya kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu semoga kebaikan kalian dibalas dengan indah oleh Allah SWT.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, and I wanna thank me for Spotify.*

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Y. B., Yafiz, M., & Irham, M. (2021). *Pengaruh Modal Kerja dan Penanggulangan Aplikasi E-Commerce (Shoptimize) Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Medan. Jurnal Islamic Circle. 2 (2): 70-85.*

Alawiyah, T. S. (2021). *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. Jurnal Sosiologi. 2 (15): 131-154.*

Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Asahan. Statistik Indonesia. 2018-2021.

Citra, P. D., & Imsar. (2022). *Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. 12 (4): 5684-5690.*

- Husniyah, A., Basyah, N. A., & Mustofa, A. (2022). *Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga*. *Jurnal Economica Didactica*. 1 (2): 2354-6360.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). *Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomisebagai Akibat Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*. 18 (2): 201-208.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). *Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dikecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas*. 18 (3): 49-66.
- Lathief, M. I., & Sundari, P. (2021). *Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatera Utara)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 294-312.
- Nirwan, Semmaila, B., & Aminuddin. (2021). *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Palopo*. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia*. 8 (1): 105-120.
- Novriansyah, M. A. (2018). *Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*. 1 (1): 59-73.
- Prawira, S. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia*. 1(1): 162-168.
- Puspa, D. H., & Inggit, K. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. 1 (2): 257-282.
- Putong, I. (2017). *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*. Mitra Wacana Media.
- Putri, F. (2020). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*. *Jurnal Samudra Ekonomika*. 4 (2): 101-113.
- Ramdhan, D. A., Setyadi, D., & Wijaya, A. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota samarinda*. 13 (1): 1-18.
- Sriwardani, Fajar, F., & Maria, S. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Determinan Perilaku Inovatif Karyawan di Organisasi*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 12 (4): 5462-5472.